**REKONSILIASI INTERNAL PALESTINA: LANDASAN UTAMA**

**NEGOSIASI DAMAI PALESTINA-ISRAEL**

***Harmiyati***

**Pendahuluan**

 Pada tanggal 12 Oktober 2017, rakyat Palestina di wilayah pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan (Gaza Strip and West Bank River) meluapkan kegembiraan pasca-penandatanganan kesepakatan damai atau rekonsiliasi antara dua faksi besar yang berseteru sejak tahun 2007, yaitu faksi Hamas dan faksi Fatah yang mendominasi organisasi PLO (*Palestine Liberation Organization*). Kesepakatan tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya pasca kesepakatan tahun 2011 yang difasilitasi oleh Mesir, di ibukota Kairo. Rekonsiliasi internal Palestina ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi langkah diplomasi Palestina menuju pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa faksi Hamas dan Fatah bermusuhan selama sekian lama ? Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak ? Bagaimana respon Israel dan prospek perjuangan Palestina merdeka pasca rekonsiliasi ?

**Organisasi-Organisasi Perjuangan Palestina**

 Sejak didirikannya Negara Israel pada 14 Mei 1948, konflik antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi di Palestina tidak dapat dihindarkan. Konflik bahkan meluas dan sudah memicu perang besar Arab-Israel sebanyak tiga kali, yaitu perang tahun 1948-1949, Perang 6 Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973. Konflik ini telah mengakibatkan sebagian rakyat Palestina mengungsi dan tercerai-berai ke berbagai Negara, seperti Yordania, Lebanon, Suriah, Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Libya, bahkan ke Amerika Serikat, Negara-negara Amerika Latin, Jerman, dan Inggris (London). Dari tempat persebarannya di negara-negara Arab tersebut mereka mendirikan organisasi-organisasi perlawanan yang tergabung ke dalam PLO.

 Organisasi PLO lahir sebagai akibat desakan kepentingan bersama antara bangsa Arab Palestina dan bangsa Arab di sejumlah Negara Arab. Mereka menginginkan sebuah organisasi yang bisa mewakili identitas Palestina dan bisa diterima oleh semua Negara Arab. Urgensi mendirikan organisasi perlawanan tersebut terungkap dari hasil KTT Arab di Kairo, Mesir, pada awal tahun 1964 yang memutuskan perlunya mengembalikan identitas rakyat Palestina dan membuat organisasi Palestina serta angkatan perangnya (Sihbudi, 1993: 27). Sementara itu, bangsa Palestina menginginkan suatu organisasi yang bisa mencakup seluruh aspirasi orang-orang Palestina, sehingga pada tanggal 28 Mei sampai dengan 2 Juni 1964 diadakan konggres Bangsa Arab Palestina I di Jerusalem Timur, dan berhasil mendirikan PLO dengan dua badan penting, yaitu Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council) yang berfungsi sebagai parlemen Palestina di pengasingan dan Komite Eksekutif (Executive Committee). Dalam konggres tersebut Ahmad Al-Syuqairi terpilih sebagai ketua PLO yang pertama dan menjabat sampai dengan tahun 1967, posisinya digantikan oleh Yahya Hamuda sampai tahun 1969. Yasser Arafat, ketua faksi Fatah, kemudian menggantikan Yahya Hamuda dari tahun 1969 sampai meninggal Nopember 2004.

Dalam piagam pendirian PLO dinyatakan bahwa:

1. Palestina adalah tanah air bangsa Arab Palestina yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah air Arab yang besar, sedangkan bangsa Palestina merupakan bagian dari bangsa Arab.
2. Palestina dengan batas-batasnya yang telah ada pada masa perwalian Inggris merupakan kesatuan wilayah yang integral.
3. Bangsa Arab Palestina adalah penentu sah di tanah airnya. Setelah Bangsa Palestina meraih kemerdekaan tanah airnya, merekalah yang berhak menentukan nasibnya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kemurnian, kehendak, dan pilihannya.

Piagam PLO menghendaki penghancuran Israel dan pendirian sebuah negara yang sekuler dan demokratis di wilayah yang diduduki oleh Israel (Alasdair Drysdale dan Gerald H. Blake, 1985: 287). Markas PLO semula ada di Jerusalem, tetapi setelah perang tahun 1967 berpindah ke Yordania. Pasca peristiwa *Black September* (September hitam) tahun 1970, yaitu peristiwa pengusiran tentara PLO oleh tentara Yordania, markas PLO berpindah lagi ke Beirut, Lebanon. Terakhir, akibat peristiwa pembantaian pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatilla tahun 1982, markas mereka berpindah ke Tunisia. Sejak dipimpin oleh Yasser Arafat, pamor PLO semakin meningkat dan pada KTT Arab di Rabbat, Maroko, pada tahun 1974 diputuskan bahwa PLO adalah satu-satunya wakil sah rakyat Palestina, status ini kemudian dikukuhkan pula oleh Majelis Umum PBB pada 22 Nopember 1974. *Palestine Liberation Army* merupakan sayap militer resmi PLO. Perjuangan PLO, selain melalui cara-cara militer juga berjuang secara diplomatik, tetapi sejak konferensi Madrid, Spanyol, pada Nopember 1991, yang menjadi titik awal serangkaian perundingan bertahap Palestina-Israel, PLO sudah mulai meninggalkan perjuangan dengan kekerasan senjata.

Diantara gerakan-gerakan perlawanan, terdapat juga organisasi-organisasi gerakan di luar PLO yang berjuang secara non-kooperatif terhadap Israel, mereka itu adalah Jihad Islam dan Hamas yang berideologi Islam. Kedua organisasi tersebut mendapat dukungan luas dari rakyat di wilayah Gaza sejak akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an, sebagai dampak dan pengaruh dari revolusi Islam Iran tahun 1979 di kawasan Timur Tengah. Jihad islam (*Islamic Jihad Movement*) didirikan pada tahun 1980 oleh anak-anak muda Palestina yang menuntut ilmu di berbagai universitas di Mesir. Dalam perjalanan perjuangannya, organisasi ini pecah menjadi tiga kelompok, yaitu Jihad Islam pimpinan Fathi Asy- Syaqaqi, Jihad Islam Baitul Maqdis pimpinan Syaikh As’ad, dan Jihad Islam Batalion Al-aqsha pimpinan Ibrahim Sibril. Diantara ketiga kelompok tersebut, Jihad Islam pimpinan Asy-Syaqaqi menjadi kelompok yang mempunyai pengikut terbanyak, namun ketiganya tidak bersedia berpartisipasi dalam politik.

HAMAS atau singkatan dari *Harakat Al-Muqawamah Al- Islamiyah* (Gerakan Perlawanan Islam) adalah organisasi perlawanan Palestina yang didirikan pada bulan Agustus 1988, beberapa bulan pasca-intifadah pertama Desember 1987, oleh Syeikh Ahmad Yassin, seorang tokoh spiritual Hamas dan kepala Islamic Center di Gaza. Cikal-bakal dari organisasi Hamas adalah organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Sebelum menjadi organisasi Hamas, kelompok ini lebih memusatkan perhatiannya pada gerakan-gerakan sosial dan moral. Pada September 1988, Hamas mengeluarkan piagam 40 halaman yang berisi program dan pandangan mereka tentang pemecahan Palestina. Bagi Hamas, isu pembebasan Palestina harus dikaitkan dengan tiga hal, yaitu: Palestina, Arab, dan Islam. Untuk itu, semangat jihad harus disebarluaskan di kalangan ummat Islam, dan masalah Palestina hanya bisa dipecahkan jika seluruh ummat Islam terlibat dalam jihad melawan kaum zionis Israel (Riza Sihbudi, 1993 :81-82). Kelompok Hamas ini aktif menggerakkan intifadah di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat, dan hingga kini, kelompok ini adalah yang terkuat dalam melawan penindasan Israel. Berbeda dengan PLO, Hamas menolak segala bentuk kompromi dengan Israel, tesis Hamas yang menganggap sia-sia melakukan negosiasi dengan Israel, terbukti dengan kegagalan demi kegagalan kesepakatan dan perundingan perdamaian Palestina-Israel yang dimulai sejak Oslo I tahun 1993 hingga tahun 2000, dan kini menemui jalan buntu. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu alas an mengapa popularitas Hamas kian melambung di kalangan rakyat Palestina di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat.

**Perseteruan Hamas dan Fatah di Palestina**

 Perbedaan-perbedaan prinsip perjuangan, perbedaan ideologi, dan persaingan pengaruh antara Hamas dan Fatah, memuncak dalam bentuk perseteruan keduanya pasca kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif yang demokratis pada 25 Januari 2006. Awal konflik dan perebutan pengaruh sebenarna terjadi sejak terbentuknya organisasi Al-Ikhwan Palestina di Jalur Gaza pada tahun 1960 dan bangkitnya Ikhwanul Muslimin di Tepi Barat yang mengakibatkan

para pemuda dari kelompok-kelompok perlawanan Palestina terpecah ke dalam kedua organisasi tersebut. Pada akhir tahun 1970-an, pernah terjadi konflik fisik dan politik antara Ikhwan dan kaum nasionalis sekuler yang memperebutkan sejumlah kursi lembaga-lembaga sosial dan kemahasiswaan di sejumlah universitas di Gaza. Pemerintah kolonial Israel pun bersikap melakukan pembiaran terhadap menguatnya pengaruh Ikhwanul Muslimin yang berhaluan Islam dan berbasis di Mesir untuk beroperasi di Palestina, dengan harapan kelompok Islamis ini bisa membantu melemahkan Fatah yang saat itu masih dianggap sebagai kelompok perlawanan yang berbahaya oleh Israel, tetapi dalam perkembangannya kemudian kelompok Hamas ini ternyata justru terbukti lebih militant dibanding kelompok nasionalis sekuler yang tergabung dalam PLO.

 Pada peristiwa intifadah I pada 8 Desember 1987, Ikhwan pada mulanya tidak mau melibatkan diri dan tidak bersedia menjalin kerjasama dengan kaum nasionalis sekuler, tetapi pada Agustus 1988, pasca pengumuman pendirian Hamas, kelompok ini mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan intifadah, dan menolak klaim sepihak PLO sebagai penggerak utama intifadah. Kelompok Hamas ini pada awalnya juga tidak mau terjun ke dunia politik, terbukti ketika pemilu I tahun1996 organisasi ini melakukan boikot dan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kuatnya pengruh Ikhwanul Muslimin dalam organisasi Hamas mendorong organisasi ini mementingkan gerakannya di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Hamas membangun sekolah-sekolah, masjid-masjid sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi ummat. Organisasi ini juga membangun rumah sakit-rumah sakit dan berbagai fasilitas layanan public yang tidak terpenuhi oleh pemerintah Fatah. Aktivitas-aktivitas pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi NGO (*Non-Governmental Organization*), sehingga memudahkan organisasi Hamas membangun hubungan keterdekatan dengan masyarakat bawah. Pasca intifadah II tahun 2000, dukungan masyarakat Palestina di wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat terhadap Hamas semakin meningkat, hal inilah yang kemudian menjadi bekal bagi Hamas untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2006.

 Penilaian masyarakat Palestina terhadap kinerja institusi-institusi social Hamas yang relatif bersih dan efektif, serta kosistensi prinsip gerakan organisasi ini yang anti-kolonialisme dan tidak kompromistis terhadap Israel, sementara di lain pihak kinerja pemerintahan oleh Fatah yang tidak efissien dan korup, serta kenyataan adanya kegagalan-kegagalan kesepakatan damai Palestina-Israel yang dijalankan pemerintah Fatah, telah mendorong rakyat Palestina di daerah pendudukan untuk lebih memilih Hamas dalam pemilu. Kepopuleran Hamas terbukti dari perolehan suara dalam pemilu legislative pada 25 Januari 2006 sebesar 76 kursi dari 132 kursi parlemen, sementara Fatah hanya memperoleh 43 kursi ([www.infopalestina.com](http://www.infopalestina.com)). Dengan perolehan suara lebih dari 50% tersebut, faksi Hamas berhak untuk membentuk pemerintahan baru. Meskipun demikian, tidak mudah bagi Hamas untuk menjalankan pemerintahannya karena adanya pemboikotan, baik internal maupun eksternal Palestina.

 Secara internal, kelompok Fatah yang sudah lama mendominasi kekuasaan pemerintahan Palestina, melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan baru di bawah Hamas. Pada bulan Maret 2006, pemimpin sayap militer Fatah menyatakan penolakan terhadap perintah dari anggota parlemen Palestina dari kubu Hamas terkait rencana pengambilalihan sector keamanan dari tangan Fatah. Mereka bahkan kemudian melakukan aksi-aksi penculikan dan pembunuhan terhadap para anggota Hamas, sehingga konflik nersenjata antara keduanya pun tak terhindarkan. Meskipun kedua belah pihak sempat beberapa kali mengumumkan gencatan senjata, namun intensitas konflik antara keduanya semakin meningkat pada Desember 2006. Mahmoud Abbas, Presiden Palestina dan sekaligus pemimpin Fatah, sempat meminta digelarnya kembali pemilu Palestina, namun permintaannya tersebut ditolak oleh Hamas yang menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu kembali dalam jeda waktu yang singkat bertentangan dengan peraturan resmi yang berlaku.

 Pada bulan Februari 2007, dengan difasilitasi oleh Arab Saudi, perwakilan Hamas dan Fatah bertemu di Mekkah untuk melakukan perundingan damai, mereka pun sepakat untuk menghentikan kontak senjata dan membentuk pemerintahan koalisi. Namun, perbedaan muncul terkait siapa yang akan menduduki jabatan menteri dalam negeri, sebuah posisi yang amat vital karena memiliki kontrol atas angkatan bersenjata. Perbedaan pendapat yang menajam inipun kemudian berakhir dengan kontak senjata. Pada tanggal 10 Juni 2007, para personil Hamas menahan beberapa anggota Fatah, bahkan mengeksekusi salah satu diantara mereka. Tindakan Hamas tersebut dibalas oleh Fatah dengan menembaki kediaman P.M. ismail Haniya dan membunuh imam masjid besar Gaza. (http://www.infopalestina.com, diakses 2-11-2017). Hamas kemudian berhasil menduduki Markas Angkatan Keamanan Nasional milik Fatah yang berlokasi di Gaza Utara dan merebut kantor Dinas Keamanan Pencegahan Palestina dari tangan Fatah. Para personil Fatah yang terdesak oleh pasukan Hamas akhirnya meninggalkan pos-pos militernya di Jalur Gaza sambil meledakkannya dengan maksud Hamas tidak bisa memanfaatkan pos-pos tersebut. Dengan mundurnya pasukan Fatah, Jalur Gaza sepenuhnya berada di bawah kendali Hamas, Presiden Mahmoud Abbas kemudian memutuskan untuk membubarkan pemerintahan koalisi Hamas dan Fatah, dan sebagai akibatnya, wilayah Palestina terpecah menjadi dua, yaitu wilayah Jalur Gaza yang sepenuhnya dikuasai oleh Hamas dan wilayah Tepi Barat yang dikuasai Fatah.

 Keterpecahan Palestina sebenarnya tidak lepas dari scenario Amerika Serikat (AS), Israel, dan Uni Eropa yang tidak menginginkan Hamas berkuasa di Palestina, karena menurut mereka Hamas adalah kelompok teroris yang tidak bersedia mengakui keberadaan Israel. Padahal cara-cara perlawanan militer adalah bentuk resistensi Hamas terhadap kolonialisme Israel yang telah berpuluh-puluh tahun menyengsarakan rakyat Palestina di wilayah pendudukan, Resistensi ini adalah sah sebagaimana dikemukakan oleh Dubes Rusia untuk Iran, Lowan Jackryan, yang mengatakan: “*Resistance is a legitimate national right for all people under occupation, resistance is not terrorism* “ (<http://www.parstoday.com>, diakses 2-11-2017).

 Sejak kemenangan Hamas dalam pemilu, AS dan Israel mulai memperkuat Fatah dengan memasok sejumlah logistic dan persenjataan, serta pelatihan-pelatihan militer untuk melawan Hamas. Pada tanggal 18 agustus 2007, AS dan UE memutuskan untuk membuka kembali hubungan dengan pemerintah Palestina tanpa melibatkan Hamas. Di lain pihak, Israel dan Mesir memulai blockade militernya ke wilayah Gaza, sehingga mengakibatkan terjadinya isolasi dan tragedy kemanusiaan terhadap sekitar 1,5 juta orang di wilayah tersebut. Hal ini kemudian mendorong lembaga-lembaga kemanusiaan dunia untuk beraksi di Gaza. Lembaga-lembaga tersebut semacam MER-C Indonesia (*Medical Emergency Rescue-Committee*), *International Solidarity Movement, Freedom Flotilla*, Amesti Internasional, *Human Right Watch*, dll. Sejak aksi blockade militer, Israel telah tiga kali melakukan invasi di Gaza dengan tujuan melemahkan Hamas, yaitu tahun 2008, tahun 2012, dan tahun 2014. Sementara Mesir menutup pintu gerbang penyeberangan Rafah yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir, sedang pemerintah Fatah menghentikan pasokan listrik, bahan bakar, obat-obatan, dan suplai makanan ke wilayah itu. Kondisi yang demikian menempatkan rakyat palestina di Jalur Gaza berada dalam penjara terbesar di dunia.

**Upaya Rekonsiliasi Damai dan Prospeknya**

 Berbagai upaya untuk menghentikan konflik antara faksi Hamas dan Fatah pernah beberapa kali dilakukan. Pada Maret 2010, perwakilan Hamas dan Fatah melakukan pertemuan di Doha, Qatar, untuk membahas masalah masa depan Palestina berupa debat resmi dan disiarkan melalui stasiun televise agar bisa disaksikan secara luas oleh public. Kemudia pada Maret 2011 kedua pihak melakukan pertemuan di Kairo, Mesir, yang berhasil mencapai kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi sementara, pembebasan para tahanan dari kedua pihak, dan pelaksanaan pemilu presiden dan dan perdana menteri pada tahun 2012. Pelaksanaan pemilu ini hingga sekarang masih juga belum terealisasi. Kedua pihak juga sepakat membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 2014, namun pelaksanaannya juga terus tertunda.

 Upaya rekonsiliasi Hamas dan Fatah kembali dilakukan di Kairo, Mesir, yang menghasilkan kesepakatan pada tangga 12 Oktober 2017, guna mengakhiri lebih dari satu dekade perselisihan internal Palestina. Poin-poin dari kesepakatan itu adalah:

1. Kedua pihak sepakat menyerahkan pengamanan perbatasan Gaza dan Mesir di Rafah kepada pemerintah bersama Palestina dengan pengawasan Badan Perbatasan Uni Eropa. Pengawal Kepresidenan Palestina akan ditugasi menjaga perbatasan yang selama ini dikelola oleh pegawai Hamas.
2. Kedua kubu menyepakati penyerahan secar penuh kendali administrasi di Gaza kepada pemerintah bersama pada 1 Desember 2017.
3. Kedua pihak sepakat bahwa Pemerintah palestina akan mengadakan pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen setahun sejak kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani.
4. Dimulainya negosiasi yang lebih luas diantara semua faksi di palestina terkait pembentukan pemerintahan bersama.
5. Disepakatinya masalah restrukturisasi kepolisian dan intelijen pemerintahan bersama serta penerjunan 3000 orang polisi di Gaza, sedang 5000 orang pegawai yang dipekerjakan Hamas di Jalur Gaza juga langsung bekerja di bawah pemerintahan bersama (*Republika*, 13 Oktober 2017:1)

Seluruh kesepakatan tersebut akan ditinjau kembali oleh Pemerintah Mesir dan harus terlaksana sebelum 1 Desember 2017.

Kesepakatan rekonsliasi ini disambut baik oleh seluruh rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan oleh sejumlah Negara Arab, juga pemerintah Indonesia. Dengan adanya rekonsliasi dan persatuan internal Palestina, diharapkan perjuangan Palestina menuju cita-cita Negara merdeka akan terwujud. Meskipun demikan, hal itu tidaklah mudah untuk ditempuh mengingat respon Israel dan sekutunya AS yang mensyaratkan bahwa kelanjutan perundingan damai Palestina-Israel harus didahului dengan komitmen Hamas yang harus mengakui keberadaan Negara Israel, melucuti persenjataannya, dan menanggalkan perlawanan terhadap Israel secara militer. Persyaratan-persyaratan Israel tersebut sangat sulit dan hampir mustahil untuk dilaksanakan oleh Hamas, mengingat tingginya tensi ketegangan antara rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan pihak militer Israel, dan ketidakpercayan Hamas yang sangat tinggi terhadap komitmen Israel. Konsistensi Hamas pada prinsip perjuangannya dikemukakan kembali oleh Kepala Biro Politik Hamas, Khaled Meshal, yang mengatakan bahwa Hamas tetap akan menjalankan misi perlawanannya terhadap Israel melalui jalur militer (<http://www.parstoday.com>, diakses 10-11-2017).

Dari perspektif Israel, upaya rekonsiliasi Hamas-Fatah ini tentu saja akan menimbulkan kegeraman yang sama oleh Perdana Menteri Israel. Benyamin Netanyahu, sebagaimana terjadi ketika tercapai rekonsiliasi internal Palestina pada mei 2011. Rekonsiliasi internal Palestina telah membuyarkan angan-angan pemerintah Israel untuk terus mendikte Pemerintah Otoritas Palestina di bawah Pemerintahan Mahmoud Abbas agar memenuhi kemauan Israel. Pemerintah Abbas selama ini sangat tunduk kepada kemauan Israel yang justru kontraproduktif karena merugikan phak Arab Palestina, hal ini misalnya dapat dilihat dari kebijakan penghentian pasokan makanan, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan ke wilayah Gaza, juga penghentian dan penundaan gaji pegawai Hamas yang bekerja di wilayah tersebut. Kebijakan tersebut merupakan hasil dari instruksi pemerintah Israel terhadap pemrintahan Otoritas Palestina, jika Abbas tidak mengindahkan perintah pemrintah Israel tsb maka dana pajak Palestina akan dibekukan oleh Israel.

Sejak tercapainya kesepakatan damai Palestina-Israel dari tahun 1993 hingga saat ini, Israel selalu mengingkari hasil-hasil kesepakatan. Bahkan sejak kebuntuan perundingan damai pada tahun 2010, Israel justru memanfaatkan momentum tersebut untuk terus memperluas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat dan Jerusalem Timur, suatu wilayah yang diklaim sebagai bagian wilayah Negara Palestina merdeka kelak. Segala bentuk pengingkaran Israel tersebut telah membuktikan tesis Hamas yang tidak mempercayai perundingan damai apapun dengan Israel. Meskipun sulit bagi Hamas untuk menerima persyaratan-persyaratan Israel bagi negosiasi damai Palestina-Israel, bagaimanapun persyaratan utama bahwa rakyat Palestina harus bersatu merupakan persyaratan mutlak bagi langkah-langkah diplomasi berikutnya Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya.

**Daftar Pustaka**

Drysdale, Alasdair, and Gerald H. Blake, *The Middle East and North Africa: A Political Geography*, 1985

Fraser, T.G. *The Arab-Israeli Conflict*, Macmillan Press Ltd., London, 1995.

Harmiyati, *Konflik Palestina-Israel*, HI UPN ‘Veteran” Yogyakarta, 2003.

Rais, Amien, *Timur Tengah*, HI UGM Yogyakarta, 1989.

Sihbudi, Riza, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, P/T.Eresco, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Timur Tengah, Dunia Islam*, dan Hegemoni Amerika, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1993.

http://www.infopalestina.com, diakses 2-11-2017.

<http://www.parstoday.com>, diakses 2-11-2017

*Republika*, 13 Oktober 2017